

Merah darah, hijau tanaman: tragedi sistem tanaman paksa dan awal runtuhan Hindia Belanda

Via Dwi Ria Safitri

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email : viadwiriasafitri@gmail.com

Kata Kunci:

Tanam paksa, kolonialisme, runtuhan hindia belanda, eksplorasi

Keywords:

Culturstelsel, colonialism, the collapse of the dutch indies, exploitation

ABSTRAK

Penerapan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menjadi babak kelam dalam sejarah Hindia Belanda. Meskipun sistem ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kolonial melalui tanaman ekspor seperti kopi, teh, dan tebu, namun hal ini mengakibatkan penderitaan dan eksplorasi rakyat Indonesia yang tak terhitung jumlahnya. Tanah dirampas, tenaga kerja dipaksa, dan hasil panen disita, yang memicu perlawanan dan kebencian yang meluas. Kebrutalan dan ketidakadilan Sistem Tanam Paksa memicu kritik dari kalangan liberal dan humanis, baik di dalam maupun di luar Hindia Belanda. Kaum liberal mengutuknya sebagai pelanggaran prinsip pasar bebas, sedangkan kaum humanis mencela sifatnya yang tidak manusiawi dan eksploratif. Kritik-kritik ini memicu gerakan anti-kolonialisme dan berkontribusi pada keruntuhan Hindia Belanda. Meskipun faktor-faktor seperti Perang Dunia I, nasionalisme Indonesia, dan krisis ekonomi global juga berperan, Sistem Tanam Paksa menjadi katalisator bagi berbagai pergolakan, termasuk Perang Diponegoro, Perang Aceh, Perang Batak, dan kebangkitan gerakan anti-kolonial.

ABSTRACT

The implementation of the Cultivation System (Cultuurstelsel) in 1830 by Governor-General Johannes van den Bosch marked a dark chapter in the history of the Dutch East Indies. While the system aimed to boost the colonial economy through export crops like coffee, tea, and sugarcane, it resulted in immense suffering and exploitation of the Indonesian people. Lands were seized, labor was forced, and crops were confiscated, leading to widespread resistance and resentment. The Cultivation System's brutality and injustice sparked criticism from both liberals and humanists, both within and outside the Dutch East Indies. Liberals condemned it as a violation of free-market principles, while humanists decried its inhumane and exploitative nature. These criticisms fueled the anti-colonial movement and contributed to the eventual downfall of the Dutch East Indies. While factors like World War I, Indonesian nationalism, and the global economic crisis also played a role, the Cultivation System served as a catalyst for various upheavals, including the Diponegoro War, the Aceh War, the Batak War, and the rise of anti-colonial movements.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Sejarah Hindia Belanda tak luput dari kisah kelam yang meninggalkan luka mendalam bagi rakyat Indonesia. Salah satu periode kelam tersebut adalah pada era penerapan sistem tanam paksa atau bisa disebut juga dengan istilah Cultuurstelsel yang digagas oleh seorang Gubernur bernama Jenderal Johannes van den Bosch yakni pada tahun 1830.

Sistem tanam paksa bagaikan pedang bermata dua bagi Hindia Belanda. Di satu sisi, sistem ini menjadi mesin penggerak ekonomi kolonial dengan menghasilkan keuntungan berlimpah dari komoditas ekspor seperti kopi, teh, dan tebu. Namun, di sisi lain, sistem ini menelan korban jiwa dan penderitaan rakyat Indonesia yang tak terhitung jumlahnya. Tanah-tanah mereka dirampas, waktu dan tenaga mereka dihisap, dan hasil panen mereka dipaksa untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial.

Tragedi sistem tanam paksa tak hanya memicu perlawanan rakyat di berbagai daerah, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan Hindia Belanda menuju jurang keruntuhan. Ketidakadilan yang tertanam dalam sistem tanam paksa memicu berbagai kritik dan kecaman dari berbagai kalangan, baik di dalam maupun luar negeri. Para liberalis Belanda menentang sistem ini karena dianggap bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar bebas.

Di sisi lain, kaum humanis mengutuk sistem tanam paksa karena dianggap tidak manusiawi dan eksploratif. Kecaman-kecaman ini terus bergema dan menguat, mendorong gerakan anti-kolonialisme yang semakin gencar. Runtuhnya Hindia Belanda bukan semata-mata akibat sistem tanam paksa. Faktor lain seperti Perang Dunia I, kebangkitan nasionalisme Indonesia, dan krisis ekonomi global juga turut berperan. Namun, sistem tanam paksa menjadi salah satu batu loncatan yang memicu berbagai pergolakan dan melemahkan fondasi kolonialisme Belanda di Indonesia.

Sub Pendahuluan

Memahami tragedi sistem tanam paksa dan bagaimana hal itu berkontribusi pada runtuhnya Hindia Belanda bukan hanya penting untuk memahami sejarah, tetapi juga sebagai refleksi diri untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Oleh karena itu pendahuluan ini hanyalah gerbang awal untuk menyelami kisah kelam sistem tanam paksa dan runtuhnya Hindia Belanda. Pada bagian selanjutnya, saya tertarik untuk menjelajahi lebih dalam tentang sejarah kelam ini, mulai dari latar belakang diberlakukannya sistem tanam paksa, dampaknya terhadap rakyat Indonesia, hingga perlawanan-perlawanan yang muncul dan akhirnya mengantarkan Hindia Belanda menuju keruntuhan.

Pembahasan

Tahun 1830, Hindia Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, melahirkan sistem tanam paksa atau Cultuurstelsel. Didasari kondisi keuangan yang morat-marit pasca perang, sistem ini bertujuan memeras keuntungan dari tanah jajahan. Rakyat pribumi dipaksa menanam komoditas ekspor

seperti kopi, tebu, dan teh untuk memperkaya pundi-pundi Belanda. Tujuan sistem tanam paksa ini adalah untuk mempertahankan kekuasaan Belanda di Indonesia dan menguasai sumber daya alam yang melimpah di wilayah jajahan. Sistem ini juga bertujuan untuk menghancurkan identitas budaya dan kebudayaan setempat serta mengantikannya dengan budaya Barat.

Tanam paksa bagaikan mesin penghisap yang kejam. Rakyat diwajibkan menyisihkan 20% lahan mereka untuk ditanami tanaman ekspor, dengan hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah kolonial. Pengawasan ketat oleh pejabat Belanda dan bupati pribumi, yang tak segan menggunakan kekerasan, menjadi momok bagi rakyat. Eksplorasi produksi pertanian yang diterapkan oleh pemerintah colonial direalisasikan melalui bentuk perkebunan negara (KURNIAWAN, 2014).

Dampak sistem tanam paksa bagaikan racun bagi rakyat Indonesia. Dipaksa bekerja keras tanpa imbalan setimpal, rakyat dilanda kelaparan dan kekurangan gizi. Sistem pertanian tradisional hancur, ketahanan pangan lokal runtuh, dan budaya gotong royong terkubu. Penderitaan rakyat tak berhenti di situ. Sistem tanam paksa tak hanya mencengkeram ekonomi, tapi juga menindas aspek sosial dan budaya. Rakyat dipaksa tunduk pada aturan dan tradisi Belanda, meninggalkan adat istiadat dan nilai-nilai budaya mereka. Diskriminasi ras yang keji semakin memperparah luka.

Kekejaman dan eksplorasi memicu perlawanan di berbagai penjuru nusantara. Perang Diponegoro (1825-1830), Perlawanan Batak (1878-1907), Perlawanan Aceh (1873-1904), Gerakan sosial protes petani, pergerakan nasional, dan Jepang sebagai kekuatan baru di Asia turut menjadi kobaran perlawanan rakyat yang tak kenal takut. Tekad untuk membebaskan diri dari cengkeraman penjajah membakar semangat para pahlawan. Meskipun menghasilkan keuntungan besar, sistem tanam paksa menjadi bumerang bagi Belanda. Sistem ini, bersama perlawanan nasional yang terus menguat, keterbatasan sumber daya, perubahan politik global, dan kebangkitan pergerakan kemerdekaan Indonesia, akhirnya mengantarkan Hindia Belanda pada keruntuhannya. Sistem tanam paksa meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia. Namun, dari situlah muncul semangat pantang menyerah dan tekad untuk meraih kemerdekaan. Sistem ini menjadi pengingat kelam akan kekejaman kolonialisme dan menjadi pemicu kebangkitan bangsa untuk meraih masa depan yang lebih cerah.

Setelah Belanda mengambil alih Hindia Belanda (1811-1816), pemikiran politik ekonomi di daerah jajahan mulai berubah dari liberal menjadi konservatif. Sistem pajak tanah dan perkebunan yang bebas selama tiga puluh tahun menghadapi banyak kendala. Penyebab utamanya adalah struktur sosial Jawa yang sangat feodal. Ketika sistem pajak tanah (1810-1830) diperkenalkan dan sistem konsesi wajib di Jawa dihapuskan, kawasan Priangan menjadi Kawasan yang luar biasa. Preanger Stelsel yang dilakukan di wilayah Priangan berupa penanaman kopi wajib membawa keuntungan besar bagi Belanda. Ini kemudian menjadi proyek percontohan penerapan sistem pertanian paksa yang diprakarsai oleh Johannes van den Bosch.

Johannes van den Bosch diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830 menggantikan Du Bus de Gisignies (APRILIA ET AL., 2021). Bosch ditugaskan untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor, yang gagal dilakukan oleh pemerintah

sebelumnya. Tugas ini sangat mendesak karena situasi perekonomian di Belanda sangat serius. Satu-satunya cara terbaik untuk menyelesaikan beban utang negara yang besar adalah dengan mengeksplorasi kekayaan negara jajahannya, Hindia Belanda. Solusi yang diusulkan Bosch adalah penerapan sistem tanam paksa (Cultuurstelsel). Sejak tahun 1830, sistem tanam paksa mulai diterapkan sebagai upaya menghidupkan kembali sistem eksplorasi zaman VOC berupa penyerahan paksa. Ikatan feodal dan hubungan patron-klien menunjukkan pengaruh yang masih kuat. Oleh karena itu, Bosch yakin bahwa produksi tanaman ekspor dapat ditingkatkan dengan memulihkan sistem pengiriman paksa.

Sistem wajib tanam merupakan gabungan dari sistem wajib menyerah dan sistem pajak bumi(ANGGASTRI, 2023). Ciri utama sistem pertanian wajib adalah kewajiban masyarakat membayar pajak dalam bentuk hasil panennya, bukan dalam bentuk uang seperti dalam sistem perpajakan. Pajak atas barang (non-moneter) memungkinkan pengumpulan sejumlah besar uang untuk keuntungan moneter. Hasil produksi tanaman ekspor yang dikumpulkan diharapkan dapat sampai ke tanah air, yang nantinya dapat dipasarkan secara luas di pasar dunia baik di Eropa maupun Amerika. Pemasaran hasil panen ekspor ke pasar dunia akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar baik bagi pemerintah maupun pengusaha Belanda, sehingga hutang ibu pertiwi dapat segera terbayar.

Dengan memperkenalkan sistem pertanian paksa, van den Bosch ingin meningkatkan intervensi Eropa dalam proses produksi. Masyarakat terpaksa menanam tanaman ekspor yang diwajibkan oleh pemerintah di tanah mereka sendiri. Secara teori, sumbangsih hasil bumi terjadi atas kemauan masyarakat sendiri, namun kenyataannya tidak demikian. Dalam kasus perkebunan kopi, kerja paksa (*forced labour*) atau kerja paksa merupakan hal yang wajib dilakukan, hampir seluruhnya dilakukan pada lahan yang belum digarap, meskipun pada praktiknya penanaman juga dilakukan pada lahan pertanian yang sudah diusahakan(SUSANTO & SUMARGONO, 2021). Secara teori, warga dibebaskan dari kewajiban membayar pajak tanah untuk tanam yang diminta pemerintah. Pembayaran tidak dikumpulkan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang atau dengan menghasilkan energi untuk bekerja(WAHID, 2017). Hal ini dinilai lebih sesuai dengan sifat rumah tangga pedesaan karena ingin tetap menjadi rumah tangga yang produktif dan mencegah ekonomi uang.

Penerapan sistem wajib tani di Pulau Jawa berlangsung dalam koridor tradisional dan feodal, dengan struktur kekuasaan yang lama. Sistem ini bekerja melalui kesepakatan antar penduduk untuk menyerahkan sebagian tanah guna menanam uang tunai yang dapat dijual di Eropa. Tanah yang diberikan tidak boleh melebihi seperlima dari luas lahan pertanian yang dimiliki penduduk desa, dan tenaga kerja yang dibutuhkan tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk menanam padi. Bagian tanah yang ditanami tanaman komersial dibebaskan dari pajak tanah dan hasil panen komersial dari tanah tersebut akan diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda.

Sistem tanam paksa dilaksanakan melalui jalur birokrasi pemerintah yang melibatkan pejabat lokal dan Eropa. Pejabat pribumi berkisar dari penguasa hingga kepala desa, sedangkan pejabat Eropa mencakup penduduk, asisten penduduk, inspektur, dan manajer pabrik yang bertugas mengawasi penerapan sistem tanam

paksa. Sistem ini menimbulkan tekanan berat pada penduduk pedesaan dan penyimpangan dalam industri yang didasarkan pada “perburuan simpanan” oleh birokrat lokal.

Meskipun sistem pertanian paksa menimbulkan berbagai kesulitan dan perlakuan menyakitkan terhadap petani Jawa, perspektif sejarah semakin berupaya menunjukkan kerangka perubahan sosial-ekonomi masyarakat Jawa yang lebih luas. Aturan penerapan sistem wajib pertanian pada prinsipnya masih dapat diterima, namun permasalahannya dalam praktiknya sistem wajib pertanian menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Sistem liberal yang diadopsi sebelumnya berarti pengabaian total dan pertanian paksa dilanjutkan dengan struktur kekuasaan tradisional dan feodal yang lama.

Pada masa penjajahan Belanda, sistem tanam paksa ini tidak memenuhi ketentuan Staatsblad Nomor 22 Tahun 1834. Sistem ini lebih menguntungkan pemerintah kolonial dan hanya merupakan salah satu bentuk eksloitasi. Gubernur Jenderal Bosch ingin Belanda campur tangan dalam proses produksi untuk memaksa petani menanam tanaman pokok yang ditentukan pemerintah di tanah mereka. Petani yang seharusnya diberi kebebasan untuk menjual hasil panennya justru hanya diwajibkan menjualnya kepada pemerintah. Lahan pertanian yang tidak bisa ditanami paksa malah dipaksa menjadi tanam paksa. Petani kehilangan mata pencaharian dan pendapatan sehingga menjadi penggembala yang menggarap lahan sendiri. Pajak yang dikenakan negara bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk tenaga kerja atau natura, yang diwakili oleh berbagai hasil karya. Hal ini dinilai lebih sesuai dengan sifat rumah tangga pedesaan, karena ingin mempertahankan mereka sebagai rumah tangga produktif dan mencegah terpeliharanya perekonomian uang.

Pembagian kerja wajib yang ditetapkan dalam Staatsblad nomor 22 Tahun 1834 merupakan pekerjaan yang diwajibkan oleh pemerintah dan harus dilakukan 66 hari dalam setahun. Pekerja paksa ini terdiri dari mereka yang tidak memiliki tanah dan juga masyarakat yang terpaksa bekerja di sawah. Penggunaan tenaga kerja secara paksa ini terbagi dalam tiga kategori: kerja paksa umum atau heerendiensten, kerja paksa kommen atau kommen Diensten, dan penanaman paksa atau culturediensten. Kerja wajib, atau heerendiensten, adalah pekerjaan wajib yang dilakukan untuk kepentingan umum, seperti membangun atau memperbaiki jalan, membangun gedung perkantoran, menjaga tahanan, dan lain-lain. Kerja paksa, atau kerja paksa, adalah kerja paksa dalam pemeliharaan lahan pertanian di tanah milik kepala adat. Pada saat yang sama, kerja paksa di perkebunan, atau cultuurdiensten, adalah penggunaan kerja paksa untuk membuka, mengairi, dan memperbaiki lahan perkebunan, untuk menanam, mengangkut hasil panen, atau untuk kebun umum lainnya. Seluruh desa dibayar atas pemberian lahan untuk bercocok tanam, bukan warga perorangan sebagai pemilik properti. Pemerintah kolonial Belanda beralasan hal itu lebih mudah ditangani. Akibatnya terjadi perluasan lahan kota dan perubahan hubungan sosial di pedesaan. Lalu yang dibutuhkan hanya 1/5 dari seluruh tanah, lalu diperluas menjadi 1/3, lalu menjadi 1/2, bahkan seluruh desa (MASLAHAH & HIDAYAT, 2016).

Penyalahgunaan selama beberapa dekade sejak diperkenalkannya sistem pertanian paksa telah menyebabkan kondisi yang buruk bagi masyarakat, terutama

petani. Gelombang kelaparan di beberapa daerah akibat kurangnya lahan pertanian dan eksloitasi tenaga kerja menimbulkan banyak kematian dan penderitaan. Di Belanda sendiri, terdapat gelombang kritik terutama dari kelompok humanis dan liberal terhadap penghentian pertanian paksa di Hindia Belanda. Sejak tahun 1860, sistem tanam paksa secara bertahap dihapuskan. Beberapa tanaman komersial dikeluarkan dari daftar tanam paksa, seperti lada pada tahun 1862, nila, teh dan kayu manis pada tahun 1865, dan tembakau pada tahun 1866.

Penerapan pertanian paksa di Indonesia ini tentunya mempunyai dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Dalam beberapa hal, tanam paksa dipandang berhasil meningkatkan produksi tanaman ekspor dan mendatangkan keuntungan besar, sehingga utang besar Belanda terbayar. Selain itu kita juga mengetahui jenis-jenis tanaman ekspor yang memiliki nilai jual tinggi, teknologi baru pertanian dan sistem ekonomi moneter yang kemudian diterapkan dalam kehidupan pedesaan. Di sisi lain, masyarakat mengalami penderitaan karena upah atau gaji yang dijanjikan tidak dibayar dan pekerjaan mereka menuntut fisik. Kelaparan juga terjadi di beberapa daerah, seperti Demak pada tahun 1848 dan Grobogan pada tahun 1849. Kritik dan gerakan muncul untuk menghapuskan sistem pertanian paksa, seperti yang dilakukan Max Havelaar (Multatuli), L. Vitalis dan Baron van Hoevell. Selain itu, akibat kelaparan dan kemiskinan, serangan oleh orang-orang yang tidak bergantung pada negara mulai meningkat di beberapa daerah.

Kelaparan ini muncul ke permukaan dan menimbulkan masalah bahwa pemerintah menggunakan terlalu banyak java. Muncullah kaum humanis dan praktisi liberal yang merencanakan serangan strategis. Multatuli (Eduard Douwes Dekker) berasal dari bidang sastra, sedangkan dari bidang jurnalisme E.S.W. Dalam politik dipimpin oleh Roorda van Eysing dan Baron van Hoevell. Tujuan mereka tidak hanya terbatas pada penghapusan pertanian paksa, tetapi juga mempunyai tujuan lain. Gerakan liberal Belanda dipimpin oleh pengusaha swasta, sehingga kebebasan yang mereka perjuangkan terutama adalah kebebasan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa negara tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi dan sektor swasta harus mengelola kegiatan ekonomi, sementara pemerintah bertindak sebagai pelindung warga negara, menyediakan infrastruktur, memberikan hukuman, dan menjamin keamanan dan ketertiban warga negaranya dalam pemerintahan di sektor perkebunan. Akibatnya, dengan sistem yang semakin menyediakan ini, banyak kaum liberal yang mulai memandang sistem ini dan menganggapnya sangat tidak manusiawi. Akibatnya, pada tahun 1870 Kerajaan Belanda memberlakukan undang-undang liberal minister de Waal, yang disebut agrarische wet, dimaksudkan untuk melindungi tanah adat dari perkebunan swasta besar di barat. Namun dalam praktiknya, undang-undang ini hanya melindungi kapitalis Eropa yang menanamkan modalnya di perkebunan, dan tetap membuka kondisi yang menguntungkan bagi mereka, misalnya dengan menawarkan harga tenaga kerja yang sangat murah, namun dengan memberikan pekerjaan yang tidak dapat diperoleh, sehingga menimbulkan kecaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. kaum liberal Belanda yang terus memikirkan perekonomian dan nasib masyarakat asli atau pribumi. Kemudian mencapai penciptaan kebijakan etis. UU

Pertanian berisi 3 pernyataan yakni:

- a. Negara berhak menyewakan tanah yang tidak digunakan oleh masyarakat asli kepada asing selama 75 tahun (Erfpacht atau tanah warisan).
- b. Penduduk asli tidak bisa menjual tanahnya kepada orang asing, tapi mereka bisa menyewakannya.
- c. Tanah yang tidak dimiliki dianggap milik negara.

Yang perlu kita ketahui, walaupun terdapat penghentian sistem tanam paksa, ternyata sistem ini memiliki andil juga yakni menjadi salah satu batu loncatan berakhirnya atau runtuhnya Hindia Belanda di Indonesia karena memicu berbagai pergolakan dan melemahkan pondasi kolonialisme di Indonesia. Masyarakat pribumi melakukan berbagai perlawanan karena adanya kejemuhan dan timbul rasa ingin memerangi serta membebaskan diri dari kecaman dan kekangan penjajah Belanda yang semakin melonjak, yang demikian perlawanan itu diperuntukkan agar bisa mengusir Belanda serta mengakhiri jajahan sehingga terjadilah atau munculah beberapa tokoh yang berperan sebagai aksi perjuangan pada tiap daerah.

Yang pertama ialah Pertempuran yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 1825-1830 adalah perlawanan dari kekuatan lokal yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Faktor-faktor yang menyebabkan perlawanan ini antara lain kekuasaan kesultanan di Yogyakarta yang semakin menyempit karena dikuasai oleh Belanda, kekecewaan para bangsawan terhadap kebijakan Belanda yang melarang mereka menyewakan tanah pada partikelir, serta keresahan pemuka agama dan rakyat terhadap pengaruh budaya barat dan pemerasan yang terjadi melalui tanam paksa. Pangeran Diponegoro, sebagai putra Sri Sultan Hamengkubuwono III, merasa tersinggung oleh campur tangan Belanda dalam proses pergantian kesultanan dan rencana Belanda untuk membangun jalan di atas makam leluhur pangeran, sehingga ia memutuskan untuk melawan Belanda(ARIWIBOWO, 2021).

Pada tanggal 20 Juli 1825, P.Diponegoro mengingkirk ke Selarong, pusat pertahanan, dan mendapat bantuan dari rakyat, ulama, serta bangsawan yang ada. Dalam kurun waktu 1 tahun, pasukan P.Diponegoro mendapat banyak kemenangan, seperti menguasai wilayah Pacitan dan Purwodadi, sehingga membuat kekalahan pada pihak Belanda yang dipimpin oleh Jendral De Kock. Belanda kemudian mendirikan Benteng Stelsel untuk mempersempit ruang gerak perlawanan dari P.Diponegoro(HARTONO, 2021). Namun, perlawanan mulai melemah karena jumlah pasukan yang semakin berkurang serta kekuatan Belanda yang dibantu oleh pasukan dari Sumatera. Pada tahun 1830, Belanda mengeluarkan maklumat bahwa siapa saja yang dapat menangkap P.Diponegoro akan diberikan imbalan sebesar 20.000 Ringgit, namun maklumat tersebut tidak berhasil. P.Diponegoro melakukan mediasi dengan Belanda di Kedu, tetapi juga tidak berhasil, sehingga ia ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Semarang, Batavia, dan Ujung Pandang. Pangeran Diponegoro meninggal pada 8 Januari 1855.

Yang kedua yakni perang Batak. Perang Batak atau Perang Tapanuli adalah konflik rakyat lokal yang terjadi karena beberapa alasan. Salah satu penyebab utamanya adalah

Belanda menduduki wilayah Tapanuli dan memaksa penyebaran agama Nasrani, yang sangat bertentangan dengan kepercayaan asli Batak Kuno, yakni animisme dan dinamisme. Selain itu, Belanda menggunakan organisasi Zending untuk menguasai Tapanuli. Kebijakan Belanda di Tapanuli yang membuat rakyat menderita karena kehilangan tanah dan pekerjaan akibat politik Liberal yang membebaskan pengusaha Eropa dalam menyewa tanah penduduk pribumi juga menjadi penyebab perang ini(NATALIA & ADITYA, 2019). Tokoh yang terkenal dalam perlawanan ini adalah Sisingamangaraja XII.

Yang Ketiga adalah perang Aceh. Aceh awalnya adalah sebuah kesultanan yang berdaulat, diakui secara sah oleh pemerintahan Belanda dan Inggris dalam Traktat London. Dalam Traktat tersebut, Belanda dan Inggris berjanji untuk menghormati kedaulatan Aceh. Namun, Belanda akhirnya mengingkari perjanjian tersebut dan ingin menguasai Aceh. Pada 1857, Belanda mengingkari perjanjian dengan Sultan Ibrahim dan mencoba menipu kerajaan Siak untuk memperalat tujuan mereka(KIRANA & WIHARYANTO, 2022). Kondisi ini memicu pertempuran di Aceh pada saat ituPada 21 Februari 1873, Belanda memutuskan untuk mengirim ekspedisi militer ke Aceh dengan tujuan menuntut pengesahan kedaulatan Belanda terhadap Aceh. Namun, Aceh tetap tidak mengakui kedaulatan Belanda. Pada 5 Desember 1873, pasukan ekspedisi Belanda tiba di Aceh dengan membawa enam kapal perang, 170 perwira, 3.198 bawahan perang, dan 1.000 narapidana atau pekerja paksa dibawah kepemimpinan Letnan Jenderal J.Van Swieten. Kedatangan ini menimbulkan pertempuran yang sangat hebat(SUDIRMAN, 2012).

Yang keempat yakni adanya gerakan sosial protes petani. Pemberontakan yang terjadi pada masa lalu adalah akibat dari kejemuhan para petani terhadap sistem tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda. Banyak petani yang mengalami kesengsaraan karena tidak mendapatkan upah yang semestinya dan tanah milik mereka yang diambil untuk keperluan pemerintahan. Salah satu contoh pemberontakan yang terkenal adalah Pemberontakan Petani Banten 1888. Pemberontakan ini direncanakan secara rinci melalui pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di rumah seorang Kyai yang terkenal, seperti Haji Marjuki, Haji Tubagus Ismail, dan Haji Wasid. Pertemuan- pertemuan ini berkedok pesta agar tidak diketahui oleh Belanda.

Dalam pemberontakan ini, tidak terlepas dari peran pemuka agama. Pada saat itu, isu yang digunakan adalah turunnya Imam Mahdi yang dalam agama Islam merupakan pertanda datangnya Kiamat. Dengan adanya isu tersebut, para pemuka agama memanfaatkan hal itu untuk menghancurkan kezaliman berupa kejahanatan pemerintahan. Dengan demikian, pemberontakan ini tidak hanya sebagai bentuk protes terhadap sistem tanam paksa, tapi juga sebagai upaya untuk menghentikan kezaliman pemerintahan Belanda yang memperparah nasib petani.

Selanjutnya ialah pergerakan nasional. Pergerakan nasional di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, munculnya kaum terpelajar sebagai akibat dari pelaksanaan politik balas budi bidang edukasi yang dilakukan oleh Belanda. Kedua, timbulnya perasaan senasib dan sepenanggungan. Ketiga, timbulnya kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Keempat, adanya dorongan akan kebesaran bangsa Indonesia pada masa lalu sebagai motivasi bahwa dahulu Indonesia merupakan

bangsa yang besar dengan melihat kembali kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Kelima, pemberlakuan hukum tata negara Hindia Belanda sebagai ikatan penyatu rakyat.

Dengan adanya beberapa faktor tersebut, akhirnya terbentuk beberapa organisasi guna melawan penjajah melalui jalur edukasi dan politik. Hal ini yang menjadikan pembeda perlawanan sebelumnya dengan perlawanan tahun 1908. Perlawanan sebelumnya masih bersifat kedaerahan, kemudian masih terpusat dan bergantung pada satu orang pemimpin. Bentuk perjuangannya masih tradisional ditinjau dari alat yang digunakan, kemudian tujuan yang ingin dicapai masih belum jelas dan belum terorganisir. Pada perjuangan masa 1908, dilakukan bersifat nasional, tidak terpusat pada satu orang pemimpin, serta perjuangan digunakan dengan sistem yang terorganisir (ICHSAN ET AL., 2023).

Kemudian, adanya semangat nasionalisme yang didapatkan melalui proses yang cukup panjang dibawah kolonialisme dan imperialisme oleh bangsa-bangsa Eropa. Sehingga ketika tumbuh perasaan yang sama sebagai rakyat terjajah dan ingin merdeka serta demi kelancaran perlawanan yang lebih masif serta terstruktur, maka munculnya beberapa organisasi-organisasi pergerakan nasional guna melawan penjajahan secara terstruktur. Beberapa organisasi bentukan pada masa itu yakni Budi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), dan Indische Partij (1912).

Budi Oetomo didirikan oleh Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji, Suwarno, dan RT. Ario Tirtokusumo dengan tujuan mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia agar sejajar dengan negara lain. Sarekat Islam didirikan oleh H. Samanhudi dan H.O.S. Cokroaminoto dengan tujuan untuk mengembangkan jiwa dagang serta memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru terhadap agama Islam. Indische Partij didirikan oleh Suwardi Sueyaningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara dengan salah satu tujuannya meningkatkan jiwa integrasi semua golongan. Kemudian, bermunculan organisasi-organisasi perkumpulan yang mengatasnamakan daerah asalnya yang berisi pemuda dan pemudi seperti Tri Koro Dharmo, Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Celebes, dan lainnya. Dan yang terakhir yakni Jepang sebagai kekuatan baru di Asia. Pada awal Perang Asia Timur Raya, Jepang berhasil menghanguskan Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat dengan menjatuhkan bom di Pearl Harbour pada sekitar 7 atau 8 Desember 1941. Dengan demikian, Jepang menjadi kuat untuk menjajah negara-negara di wilayah Asia Pasifik. Setelah itu, Jepang mulai menyerang Filipina dan kemudian memasuki Indonesia melalui Ambon, menguasai Maluku, walaupun di Ambon terdapat pasukan KNIL dan Australia yang tidak mampu menghadang Jepang.

Pada Januari 1942, Jepang mulai masuk ke Indonesia dan berhasil menguasai Maluku. Kemudian, pada 1 Maret 1942, Jepang berhasil menang dalam Perang Pasifik dan mampu mengontrol wilayah yang lebih luas. Pada saat yang bersamaan, sekutu membentuk ABDACOM (American British Dutch Australian Command) yang bermakas di Lembang dengan panglima Letnan Jenderal Ter Poorten. Namun, meski telah bergabung, ABDACOM tetap dapat dikalahkan oleh Jepang.

Pada 1 Maret 1942, Jepang mulai memasuki Jawa melalui tiga tempat, yakni Banten yang dipimpin Jenderal Imamura, Wetan Indramayu yang dipimpin Kolonel Tonishori,

serta Bojonegoro yang dipimpin Mayjend Tsuchihasaki. Pada 5 Maret 1942, Batavia sebagai markas terbuka sekutu akhirnya jatuh ditangan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat.

Kesimpulan dan Saran

Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara, beberapa kebijakan dan perubahan telah dilakukan yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat pribumi. Kebijakan yang telah ada sebelumnya, seperti sistem pajak tanah yang diperkenalkan oleh Raffles, akhirnya dilebur menjadi Sistem Tanam Paksa oleh van den Bosch. Sistem ini menyalahi aturan dan menyeleweng dari aturan yang dibuat dalam Staatsblad Tahun 1834 Nomor 2, sehingga banyak rakyat yang sengsara. Kondisi ini memunculkan perlawanan dari penduduk lokal, mulai dari petani hingga kerajaan. Perlawanan ini berupa perlawanan politik dan edukasi dari kaum terpelajar yang didasarkan perasaan senasib dan sepenanggungan. Perlawanan ini akhirnya membuat pemerintahan Hindia Belanda kacau balau, ditambah dengan adanya kekuatan baru di Asia, yakni Jepang. Pada 8 Maret 1942, Hindia Belanda menyerah tanpa syarat, dan Indonesia mengalami penjajahan baru oleh Jepang.

Saran yang bisa saya berikan terkait pemaparan penjelasan diatas yakni untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari sistem tanam paksa, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus terus berupaya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang sejarah dan dampak sistem tanam paksa. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami bagaimana sistem ini telah mempengaruhi kehidupan mereka dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam mengatasinya. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga dapat mengembangkan program-program yang berfokus pada pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Program-program ini dapat berupa pelatihan, bantuan, dan fasilitas yang membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran mereka tentang pentingnya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mandiri dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan yang dihadapi.

Daftar Pustaka

- Anggastri, S. N. P. (2023). Preangerstelsel: Sistem Tanam Paksa Kopi Priangan Tahun 1723-1892. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 3(2), 445–459.
- Aprilia, A. T., Irawan, H., & Budi, Y. (2021). Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda 1830-1870. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 119–134.
- Ariwibowo, T. (2021). Strategi perang semesta: Pertempuran pangeran diponegoro menghadapi belanda 1825-1830. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(5), 2537–2550.

- Hartono, A. S. (2021). LITERATURE REVIEW; PERANG JAWA TERBESAR (PERANG DIPONEGORO) 1825-1830 DALAM PANDANGAN KONSEP PERANG SEMESTA ATAU TOTAL WAR. *Pelita: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 21(1), 80–92.
- Ichsan, M., Maulia, S. T., Hendra, H., & Salam, M. (2023). Budi Utomo: Pemantik Pergerakan Nasional. *Jurnal EduSosial*, 3(1), 96–106.
- Kirana, A., & Wiharyanto, K. (2022). PERJUANGAN CUT NYA DIEN DALAM MELAWAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DI ACEH TAHUN 1896-1906. *HISTORIA VITAE*, 2(1), 42–52.
- Kurniawan, H. (2014). Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2). <http://journal.uny.ac.id/index.php/sosia/article/view/5301>
- Maslahah, W., & Hidayat, A. W. (2016). Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat di Jawa 1830-1870. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(02). <http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/1454>
- Natalia, S. F., & Aditya, M. F. (2019). Dampak Perang Batak pada Tahun 1878-1907 Terhadap Penyebaran Agama Kristen di Sumatera Utara. *Tsaqofah*, 17(1), 42–48.
- Sudirman, S. (2012). Peutjoet: Membuka tabir kepahlawanan Rakyat Aceh No. 31/2012. Direktorat Jenderal Kebudayaan. <https://repository.kemdikbud.go.id/19557/>
- Susanto, H., & Sumargono, S. (2021). Runtuhnya Kejayaan Kopi Priangan Tahun 1870-1900. *Journal of Social Science Education*, 2(2), 92–97.
- Wahid, A. (2017). Dualisme Pajak di Jawa: Administrasi Pajak Tanah di Wilayah Vorstenlanden pada Masa Kolonial, 1915–1942. *Lembaran Sejarah*, 13(1), 28–47.